PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL - INSPEKTUR BANDAR UDARA - ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA
2023

PERMENHUB. NO. 34, PM 2023/ NO. 485, 27 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN UNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENPAN-RB Nomor 57 Tahun 2018; PERMENPAN-RB Nomor 58 Tahun 2018; PERMENHUB Nomor 17 Tahun 2022;
 - Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara merupakan JF kategori keahlian dimana Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dimulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yang terdiri atas Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama, Inspektur Bandar Udara Ahli Muda dan Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terdapat ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan Inspektur Bandar Udara dan Asisten Inspektur Bandar Udara yang dapat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi JF Inspektur Bandar Udara dan F Asisten Inspektur Bandar Udara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan pengangkatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864).
 - Lampiran : 27 hlm.